

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan perekonomian Indonesia dikarenakan hampir seluruh kegiatan perekonomian Indonesia berpusat pada sektor tersebut. Sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas negara melalui ketersediaan dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional dalam masa Kabinet Kerja 2015-2019. Hal ini ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dengan menetapkan tujuh komoditas pangan utama yang diprioritaskan untuk dikembangkan lima tahun kedepan, tiga diantaranya merupakan komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung, kedelai (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2016).

Pada awalnya, bagi kebanyakan orang jagung hanya dikenal sebagai bahan makanan pengganti beras. Padahal, komoditas ini bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Selain komoditi beras, beberapa tahun ini pemerintah juga gencar melakukan program untuk mendorong dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang telah dicanangkan. Pada tahun 2015, kementerian pertanian mencanangkan program untuk peningkatan produksi pangan diantaranya adalah jagung. Ini merupakan impian besar bangsa Indonesia untuk swasembada pangan, yang tidak ingin bergantung pada pasokan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris, wajar jika pemerintah memfokuskan kebijakannya pada tanaman pangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan (Ligawati, 2016). Dalam rencana pembangunan pertanian Indonesia, kebijakan sektor pangan selalu mendapatkan prioritas penting. Setiap sasaran pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai peningkatan produksi pangan.

Pemerintah kabinet kerja periode 2015-2019 saat ini telah berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan serta swasembada pangan yang mengacu pada Nawa Cita (9 agenda prioritas pembangunan nasional) yang salah satu agendanya adalah terwujudnya kedaulatan ekonomi tercantum di dalamnya termasuk pencapaian kedaulatan pangan, terutama komoditas padi, jagung dan kedelai yang ditargetkan terwujud pada tahun 2017. Dalam mengimplementasikan swasembada pangan padi, jagung, kedelai (Pajale), Pemerintah kabinet kerja membuat suatu kebijakan dan program peningkatan produksi Pajale tahun 2015 menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI No 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman UPSUS (Upaya Khusus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya (Adawiyah, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah akan swasembada pangan terutama jagung cukup menjadi perhatian.

Peningkatan kebutuhan jagung di dalam negeri berkaitan dengan perkembangan industri pakan, terutama pakan ayam ras, baik ayam pedaging maupun ayam petelur. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi daging dan telur yang berdampak langsung pada kebutuhan jagung sebagai bahan baku pakan ternak. Jagung merupakan bahan baku utama pakan unggas (sekitar 50 % dari ransum) sehingga harga jagung akan sangat mempengaruhi biaya produksi unggas (Tangendjaja dkk, 2002). Tingginya komponen jagung dalam pakan ternak dan peningkatan konsumsi jagung untuk pakan ternak, maka ketersediaan jagung dalam negeri harus selalu dipertahankan terutama melalui produksi jagung dalam negeri untuk mendukung pengembangan peternakan. (Direktorat Jenderal Peternakan, 2011).

Selain jagung sebagai pakan untuk ternak, jagung merupakan salah satu alternatif bahan bakar nabati (biofuel). Dengan kelangkaan bahan bakar minyak dari fosil juga mendorong berbagai negara di dunia, seperti Amerika Serikat dan Brazil untuk mencari energi alternatif dari bahan bakar nabati (biofuel). Jagung cukup potensial untuk dijadikan bahan baku bioetanol sebagai substitusi bagi premium (bahan bakar minyak). Hal ini tentu saja menyebabkan permintaan jagung di pasar dunia juga semakin meningkat, sulit didapat, dan mahal harganya, karena pengeksport jagung terbesar di dunia seperti Amerika Serikat dan Cina

telah mengurangi ekspornya karena kebutuhan dalam negerinya semakin meningkat, di antaranya untuk industri bioetanol (Siregar, 2009). Amerika Serikat dan Cina dengan menghentikan ekspornya sehingga mendorong harga jagung semakin tinggi.

Impor jagung diperlukan jika produksi nasional kurang mencukupi untuk kebutuhan pabrik pakan. Pada tahun 2000 – 2004 volume impor jagung selalu di atas 1 juta ton, sementara pada tahun 2005 – 2009 volume impor di bawah 1 juta ton, kecuali tahun 2006 volume impor mencapai 1,77 juta ton, sementara volume impor jagung periode 2011 – 2015 selalu di atas 3 juta ton, kecuali tahun 2012 hanya sebesar 1,81 juta ton. Tingginya impor jagung diperkirakan karena produksi jagung nasional belum mencukupi, sedangkan ada peningkatan kebutuhan jagung untuk bahan baku industri khususnya industri pakan, menyebabkan permintaan jagung impor cukup besar. Pada tahun 2014 volume impor jagung stabil sekitar 3,17 juta ton, dan volume impor tahun 2015 naik menjadi 3,50 juta ton, volume impor jagung tahun 2016 sampai dengan Bulan Mei sebesar 880 ribu ton. Rendahnya volume impor tahun 2016, karena adanya pembatasan/pelarangan impor jagung, dengan tujuan produksi jagung dalam negeri dapat terserap oleh industri pakan (Kementerian Pertanian, 2016).

Produksi jagung selama kurun waktu 1980-2016 tertinggi dicapai pada tahun 2016 ini yaitu sebesar 23,19 juta ton. Jika dilihat perkembangan produksi jagung pada 5 (lima) tahun terakhir, produksi jagung mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,89% per tahun. Pada tahun 2012 produksi jagung sebesar 19,39 juta ton, kemudian lima tahun berikutnya (2016) produksi jagung meningkat menjadi 23,19 juta ton. Selama periode tahun 2012 sampai 2016, terjadi 1 kali penurunan produksi jagung, yaitu tahun 2013 produksi jagung turun sebesar 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 18,51 juta ton. Penurunan produksi jagung tahun 2013 disebabkan oleh penurunan produktivitas dan penurunan luas panen. Penurunan produksi jagung juga bisa disebabkan bergesernya pola tanam, atau beralih ke komoditas lain (Kementerian Pertanian, 2016).

Produksi jagung terutama tersebar di 17 provinsi sedangkan pasar jagung utama berada di pulau Jawa. Sebagian besar daerah produksi jagung ini masih

belum memiliki prasarana transportasi yang baik sehingga arus jagung dari daerah produksi menuju daerah pemasaran terkendala. Demikian pula, pertanaman jagung terutama masih dilakukan di lahan kering tadah hujan sehingga puncak produksi terjadi pada bulan-bulan Februari-April (60%). Padahal, kebutuhan industri relatif merata sepanjang tahun. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan penyediaan jagung untuk industri, dan menyebabkan sebagian industri terpaksa melakukan impor. Tahun 2014 impor jagung untuk industri pakan telah mencapai 3,16 juta ton meningkat 1,7 juta ton tahun 2013. Pada tahun 2015, impor jagung diperkirakan akan mencapai 3,5 juta ton atau mengisi sekitar 43% kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak nasional (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2016). Masalah mendasar pemasaran jagung yang sering muncul ke permukaan adalah kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Di satu sisi, petani sulit memasarkan jagung dengan harga yang layak, di sisi lain pabrik pakan sering kesulitan memperoleh jagung dari dalam negeri, sehingga harus mengimpor jagung (Swastika dkk, 2011).

Ketergantungan impor jagung juga disebabkan mutu jagung lokal yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kadar air yang cukup tinggi sekitar 25% - 35% (Kementerian Pertanian, 2016). Pabrik pakan lebih memilih jagung impor karena kadar airnya sudah sesuai dengan kebutuhan pabrik, sedangkan jagung lokal harus dikering ulang sehingga ada tambahan harga untuk mencapai kadar air sesuai kebutuhan pabrik pakan. Hal ini mengindikasikan daya saing jagung Indonesia masih rendah. Selain itu, daya saing jagung juga terkait dengan kemampuan ketersediaan dan penggunaan input produksi jagung yang efisien yaitu ketersediaan lahan, penggunaan benih unggul, penggunaan pupuk yang optimal, penggunaan tenaga kerja, inovasi teknologi dan faktor-faktor yang lain. Pemerintah sudah menyalurkan benih unggul dan mendorong petani jagung untuk menggunakan benih unggul serta mengurangi penggunaan benih lokal. Adanya sumber daya lokal, teknologi dan dukungan pemerintah menjadi peluang produksi jagung untuk ditingkatkan (Situmorang, 2013).

Daya saing merupakan hal yang sangat penting bagi suatu komoditas atau industri agar dapat bertahan di era pasar bebas saat ini. Apabila suatu komoditas atau industri tidak memiliki daya saing yang baik, maka tidak dapat bersaing

dengan komoditas atau industri dari negara lain yang memiliki daya saing yang lebih tinggi. Menurut Sudaryanto dan Simatupang (1993) daya saing akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditas yang memiliki daya saing dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Salah satu komoditas strategis bagi Indonesia yang diupayakan agar dapat berdaya saing seperti jagung. Sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen tanaman pangan 2015-2019, komoditas prioritas pertanian andalan pangan utama yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu (Kementerian Pertanian, 2011).

Suatu komoditas akan mampu bersaing di pasar bila memiliki daya saing tinggi. Daya saing yang tinggi dicerminkan dengan harga dan kualitas yang baik. Tetapi hal ini akan menimbulkan masalah apabila komoditas yang dihasilkan tidak mampu bersaing. Keunggulan komparatif dan kompetitif suatu komoditas tergantung dari faktor kunci diantaranya adalah keragaan pasar. Disamping itu intervensi pemerintah berupa kebijakan akan turut mempengaruhi keunggulan komparatif dan kompetitif suatu sistem komoditas. Apalagi saat ini telah memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya. Masalah produktivitas, mutu, efisiensi dan daya saing menjadi sedemikian penting mengingat intensitas perdagangan internasional menjadi semakin intens, baik melalui impor maupun ekspor (Kurniawan, 2008). Dengan demikian tanpa membangun produktivitas, mutu, efisiensi dan daya saing, Indonesia tak akan mampu menang dalam persaingan global. Bukan saja di pasar internasional tapi juga di pasar dalam negeri atau domestik.

Dalam peningkatan produktivitas jagung, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi melalui penyebarluasan benih unggul dan peningkatan teknik budidaya jagung spesifik lokasi. Pemerintah saat ini dalam mengimplementasikan swasembada pangan padi, jagung, kedelai (Pajale), membuat suatu kebijakan dan program peningkatan produksi Pajale tahun 2015 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman UPSUS (Upaya Khusus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Upaya mendorong produksi jagung nasional juga selayaknya melalui pemberian

rangsangan harga output kepada petani jagung. Kenyataan di lapangan bahwa seringkali harga jagung rendah dan cenderung ditekan secara sepihak oleh pabrik pakan/pedagang, tidak memberi rangsangan yang cukup kepada petani untuk menggunakan teknologi produksi yang lebih baik, sehingga produktivitasnya masih rendah. Harga jagung yang rendah juga tidak merangsang petani untuk menanam jagung dalam areal yang lebih luas (Agustian, 2012).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data Pusdatin Kementan (2017) rata-rata produksi jagung di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2016 yaitu sebesar 15.185.638,35 ton per tahun dengan pola pergerakan produksi yang berfluktuasi (Lampiran 1). Penghasil jagung di Indonesia tersebar diseluruh provinsi antara lain Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Provinsi Jawa Timur merupakan penghasil jagung terbesar di Indonesia dengan kontribusi produksi jagung sebesar 31 persen dari total produksi jagung nasional. Selanjutnya diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah dengan kontribusi produksi sebesar 16 persen dari total produksi jagung nasional. Setelah itu, Provinsi Lampung menempati urutan ke 3 sebagai provinsi sentra produksi jagung di Indonesia yaitu dengan kontribusi produksi sebesar 10 persen dari total produksi jagung nasional. Dengan kata lain, lebih dari 50 persen produksi jagung di Indonesia dihasilkan oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung dan sebagian lagi yaitu 50 persen di produksi oleh Provinsi lainnya.

Di Indonesia, Sumatera Barat merupakan provinsi ke sembilan penghasil jagung setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo (Lampiran 2). Dari data Pusdatin Kementan (2017), produksi jagung di Sumatera Barat lebih kecil bila dibandingkan provinsi lainnya, Produksi yang masih sedikit mengindikasikan perlu adanya pengembangan potensi usahatani jagung secara berkelanjutan dan memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri. Kedudukan jagung yang strategis tersebut melandasi pemerintah,

khususnya pemerintah Sumatera Barat untuk terus mengupayakan peningkatan produksi jagung dalam negeri. Berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan jagung nasional baik melalui pendekatan intensifikasi (perbaikan teknik budidaya dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan produktivitasnya) maupun ekstensifikasi (perluasan areal penanaman). Hal tersebut dapat terlihat produksi jagung di Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, dimana untuk tahun 2012 produksinya sebanyak 471.849 Ton sedangkan di tahun 2017 produksi 711.532 Ton (BPS Sumbar, 2017). Lebih jelas produksi jagung di Sumatera Barat berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2017 dapat dilihat pada (lampiran 3).

Selanjutnya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Kabupaten Pasaman sebagai salah satu kawasan produksi jagung di Sumatera Barat yang ikut serta dalam mengambil peluang pasar. Kabupaten Pasaman di tetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Kabupaten penyangga tanaman jagung melalui SK Gubernur Nomor : 521.305.2013 tentang penetapan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Pasalnya, Kabupaten Pasaman di nilai sebagai daerah potensial untuk pengembangan tanaman jagung. Dengan potensi itu, Kabupaten Pasaman sejak tahun 2013 telah ditetapkan sebagai kawasan jagung di Sumatera Barat. Hal ini terbukti dari potensi tanaman jagung dimana produksinya dalam kurun 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Produksi jagung terbanyak di Kabupaten Pasaman pada tahun 2017 terdapat pada Kecamatan Tigo Nagari, dapat di lihat pada lampiran 4.

Dalam rangka peningkatan produksi jagung, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang meliputi kebijakan input dan output (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2015). Kebijakan terkait input usahatani jagung antara lain subsidi pupuk dan bantuan benih. Kebijakan terkait output adalah mendorong pemerintah daerah agar menampung produksi jagung petani pada saat panen, sehingga harganya stabil dan tidak jatuh disaat musim panen. Hal ini di tingkat petani, seringkali harga jagung rendah dan cenderung ditekan secara sepihak oleh pedagang, dan tidak memberi rangsangan yang cukup kepada petani untuk menggunakan teknologi produksi yang lebih baik, sehingga produktivitasnya masih rendah. Hal ini mengingat sejak tahun 1990 kebijakan pengaturan harga

dasar jagung sudah tidak ada, dan harga jagung ditentukan oleh mekanisme pasar. Oleh karena itu, upaya mendorong produksi jagung nasional juga selayaknya melalui pemberian rangsangan harga output kepada petani jagung. Harga jagung yang rendah tidak memberi rangsangan terhadap petani untuk menanam jagung dalam areal yang lebih luas dan menggunakan anjuran teknologi secara baik (Agustian, 2012).

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usahataniya agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal. Oleh karenanya, pupuk dipandang perlu untuk disubsidi. Secara historis, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET). Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai: (1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional (Syafa'at dkk, 2006).

Pemerintah saat ini dalam mengimplementasikan swasembada dengan membuat suatu kebijakan dan program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai tahun 2015 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 03/Permentan/OT.140/2/2015 tentang pedoman UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai Melalui program Upsus tiga komoditas utama padi jagung kedelai (PAJALE), pemerintah sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan pangan. Dengan sasaran produksi Pajale yang telah ditetapkan melalui

dukungan kegiatan dan anggaran yang sangat besar, pemerintah, masyarakat dan akademisi berbagi peran untuk pencapaian sasaran tersebut. Pada kegiatan Upsus Pajale, segala strategi dan upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah-daerah produksi pangan.

Kebijakan pemerintah yang ada akan berpengaruh terhadap input dan output dalam usahatani jagung. Kebijakan yang mengakibatkan biaya input menurun dan menambah nilai guna output akan meningkatkan daya saing usahatani jagung, sedangkan kebijakan yang mengakibatkan biaya input menjadi naik dan nilai guna output menurun akan menurunkan daya saing (Porter dan Klaus, 2008).

Keberhasilan dalam peningkatan produksi jagung sangat ditentukan oleh adanya perubahan-perubahan dari berbagai aspek, baik teknis maupun ekonomis. Perubahan-perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan berproduksi petani jagung. Perubahan harga jagung dan harga input seperti pupuk dan pestisida sering berpengaruh terhadap penggunaan input dan keputusan berproduksi. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima oleh petani jagung, sebab keberlanjutan usahatani jagung tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh. Rendahnya harga jual jagung yang diikuti dengan tingginya biaya produksi menyebabkan kemampuan petani jagung untuk memperoleh keuntungan menurun. Suatu komoditas akan mampu bersaing di pasar domestik maupun di luar negeri bila memiliki daya saing yang tinggi dan hal ini di cerminkan dengan harga dan kualitas yang baik serta adanya intervensi pemerintah berupa kebijakan yang dilakukan. Dengan melihat adanya peluang yang sangat besar bagi peningkatan produksi dan pengembangan komoditas jagung Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di dalam dan di luar negeri, dan sebagai Kabupaten penyangga komoditi jagung di Sumatera Barat yang berpotensi dalam peningkatan jumlah produksi jagung, dengan demikian, penting untuk dipertanyakan 1) bagaimana usahatani jagung di Kabupaten Pasaman masih menguntungkan secara privat dan sosial, 2) bagaimana nilai daya saing jagung dilihat dari keunggulan kompetitif dan komparatif, 3) bagaimana kebijakan pemerintah terhadap keuntungan dan daya saing komoditi jagung di Kabupaten Pasaman.

Sementara itu, selama ini tidak banyak diperoleh informasi terbaru mengenai daya saing usahatani jagung di wilayah tersebut. Padahal informasi atau data ini sangat penting tersedia sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan atau langkah-langkah intervensi guna pengembangan komoditas jagung tersebut di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dan Kabupaten Pasaman pada khususnya.

Kabupaten Pasaman telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Kabupaten penyangga tanaman jagung. Selama ini belum ada yang mengukur tingkat daya saing dari komoditas jagung di Kabupaten Pasaman. Adapun Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat tentang *Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditi Jagung Di Kabupaten Pasaman Barat* yang dilakukan oleh Diana tahun 2013 dimana kebijakan yang dilakukan pemerintah saat itu di Kabupaten Pasaman Barat berupa subsidi pupuk urea kepada petani sedangkan penelitian ini bukan hanya kebijakan subsidi pupuk urea melainkan adanya kebijakan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai Melalui program UPSUS PAJALE.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Tingkat keuntungan privat dan sosial usahatani jagung di Kabupaten Pasaman.
2. Daya saing jagung melalui keunggulan komparatif dan kompetitif.
3. Dampak kebijakan pemerintah terhadap keuntungan dan daya saing komoditi jagung di Kabupaten Pasaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Tambahan informasi tentang kondisi aktual usahatani jagung baik bagi petani maupun pemerintah.
2. Bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait

dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien bagi pengembangan komoditi jagung.

3. Tambahkan pengetahuan atau rujukan bagi civitas akademika dalam melakukan penelitian selanjutnya.

